

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Paradigma pendidikan di masa depan dihadapkan untuk menyiapkan kondisi yang disebut bonus demografi untuk generasi emas tahun 2045. Pendidikan merupakan sebuah investasi yang berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan membekali peserta didik bukan hanya sekedar perolehan ijazah dan persoalan akademik tetapi bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik memperoleh kecakapan hidup. Guru atau pendidik adalah orang yang berperan dalam menyiapkan generasi emas sehingga peningkatan peran pendidikan harus diiringi oleh profesionalisme guru dan manajemen pendidikan yang profesional.

Bimbingan dan konseling yang terintegrasi dalam keseluruhan program pendidikan berperan penting dalam menyiapkan peserta didik agar optimal dan memiliki kecakapan hidup. Guru BK perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar tetap eksis dan maju sehingga dapat menunjukkan kualitas dan mutu layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu bagian yang menyeluruh dalam pendidikan. Selanjutnya, guru BK harus andal dalam menampilkan kinerja yang berkualitas sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan publik dan akuntabilitas agar diakui dan dimanfaatkan keberadaannya. Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan BK, profesionalitas, serta perwujudan kinerja guru BK, maka kegiatan layanan bimbingan dan konseling harus memiliki program yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan keilmuan bimbingan dan konseling yakni bimbingan dan konseling komprehensif.

Program bimbingan dan konseling komprehensif yang disampaikan oleh ASCA terdiri dari 4 hal yakni: (1) *foundation* (landasan) termasuk filsafat, standar / kompetensi, dan wilayah pengembangan pribadi, karir, akademik; (2) *delivery system* (sistem layanan) termasuk kurikulum bimbingan, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem; (3) *management system* (sistem manajemen) termasuk pengorganisasian, program *assessment*, implementasi dan

manajemen program; dan (4) *Accountability system* (sistem akuntabilitas) termasuk laporan hasil, evaluasi kinerja, audit program (ASCA, 2012). Berdasarkan paparan program bimbingan dan konseling komprehensif dan mengacu pada Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling (POP BK) maka kegiatan supervisi berada dalam wilayah sistem akuntabilitas kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.

Akuntabilitas menjadi konsep penting dan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling untuk keefektifan kegiatan yang diselenggarakan. Akuntabilitas di dalamnya terdapat evaluasi sebagai faktor yang memengaruhinya, dan sistem manajemen sebagai dasar implementasi sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, istilah akuntabilitas sering dikaitkan dengan istilah evaluasi, meskipun keduanya memiliki perbedaan. Badrujaman, A., Furqon, Yusuf, S., Suherman (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan tentang evaluasi program BK berorientasi akuntabilitas menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi membutuhkan waktu yang banyak. Sedangkan, tingginya beban kerja guru BK menyebabkan kegiatan evaluasi tidak diikuti dengan kualitas yang baik.

Berkaitan dengan peningkatan mutu bimbingan dan konseling, hal yang sering menjadi persoalan adalah rasio antara guru BK dengan peserta didik dimana secara ideal sebagaimana termaktub dalam Permendikbud No.111 Tahun 2014 bahwa rasio satu orang guru BK melayani 150 konseli atau peserta didik (1:150). Namun, fakta di lapangan rasio guru BK dengan peserta didik masih lebih banyak dari 150 peserta didik atau konseli. Seperti halnya disampaikan dalam konferensi Cabang ABKIN DKI Jakarta yang diperoleh melalui informasi online dari RadarOnline.id (2018) mengemukakan bahwa rasio jumlah guru BK dengan peserta didik masih 1:321. Informasi lain yang disampaikan dalam konferensi adalah berkenaan dengan mutu penyelenggaraan BK yaitu kegiatan bimbingan klasikal secara tatap muka yang masih belum optimal, tidak adanya jam tatap muka di kelas di beberapa sekolah DKI Jakarta, serta SDM guru BK yang masih ada latar belakangnya bukan berasal dari keilmuan bimbingan dan konseling.

Selanjutnya, kegiatan evaluasi masih belum bisa terlaksana secara menyeluruh, tidak dijadikan sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut untuk pengembangan program berikutnya. Memerhatikan kondisi ini, evaluasi sebagai hal yang berkaitan dengan akuntabilitas masih perlu perhatian sebagai upaya peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling.

Peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling akan berkaitan dengan kompetensi guru BK dalam menyelenggarakan program bimbingan dan konseling. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK adalah kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik yang harus dimiliki guru BK adalah memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana pendidikan (S-1) bidang bimbingan dan konseling, dan berpendidikan profesi konselor. Sedangkan kompetensi profesional konselor/guru BK meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional (Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008).

Upaya peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling dibangun dengan cara guru BK senantiasa perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui sikap akuntabilitas, komitmen, dan tanggung jawab pada seluruh tugas profesinya. Peningkatan kualitas guru BK juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, workshop, serta pembinaan melalui supervisi (Anjar, T., 2014, hlm.1). Pelaksanaan supervisi yang dilakukan secara konsisten dalam hal administratif, klinis, maupun pengembangan kemampuan dan potensi guru BK merupakan bentuk peningkatan akuntabilitas guru BK (Suherman, U., 2013, hlm.108). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru BK akan berdampak pada pemberian layanan yang dipengaruhi oleh kualitas supervisi (Bradley, G., Engelbrecht, L., & Hojer, S., 2010, hlm.775).

Billot & Peluso (2009) menyebutkan “*supervision is an important factor in the development and growth of future family counselors*”. “*Supervision is part in the development of professionalization*” (Bradley, G., Engelbrecht, L., Hojert, S., 2010). “*Supervision as an important mechanism of professional development and practice improvement*” (Egan, R., Maidment, J., & Conolly, M., 2016). Pernyataan Egan menjelaskan pentingnya supervisi bukan hanya sebagai bagian dari manajemen organisasi melainkan mengacu pada tujuan dari supervisi yakni

peningkatan layanan (*improving service*), pengembangan konselor (*developing counselor*), dan kontrol kualitas (*controlling quality*) (Williamson, E.G., 1948, hlm. 299). Egan juga menjelaskan bahwa supervisi yang efektif akan meningkatkan kualitas intervensi dan profesional. "*Effective supervision has the potential to create a more positive environment for staff and enhance the quality of practice*" (Egan, R., Maidment, J., & Conolly, M., 2016). Praktik supervisi yang efektif dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dari profesi konselor, dan kualitas layanan dipengaruhi oleh kualitas dari supervisi yang dilakukan (Bradley, G., Engelbrecht, L., Hojert, S., 2010).

Mengingat pentingnya pengembangan kemampuan guru BK salah satunya melalui supervisi yang efektif, maka dalam bimbingan dan konseling membutuhkan *supervisor* yang melakukan fungsi supervisi dan bertanggung jawab mengawasi pekerjaan guru BK. Pengawas berperan sebagai pembimbing yang dikemukakan secara fungsional memberi bantuan kepada kepala sekolah dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dan bimbingan (Santosa, 2010, hlm. 103). Sedangkan menurut Permendikbud no.143 Tahun 2014 pengawas bimbingan dan konseling adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas supervisi kegiatan bimbingan dan konseling pada sekolah/madrasah.

Mengacu pada panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kemendikbud dalam kajian ini difokuskan pada supervisi BK. Tugas pokok pengawas adalah sebagai berikut: 1) melakukan pembinaan; 2) melakukan pemantauan; 3) melakukan penilaian; dan 4) melakukan pembimbingan dan pelatihan. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah yakni: 1) menyusun program supervisi, 2) melaksanakan program supervisi (penilaian dan pemantauan) serta melaporkan hasil pelaksanaan, 3) melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi, serta 4) memberikan pembimbingan dan pelatihan profesional. Kegiatan supervisi yang efektif sebagaimana diharapkan adalah mengikuti standar supervisi sebagaimana ada dalam pedoman pelaksanaan.

Faktanya di lapangan yang diperoleh dari beberapa temuan hasil penelitian mengenai supervisi masih menjadi perhatian. Supervisi masih sangat diperhatikan

terutama dalam hal kualitas proses supervisi masih minim penelitian yang mengungkapkan sifat supervisi secara rinci (Armstrong, 2004). Dalam hal ini peranan pengawas bukan hanya sebatas mengawasi kegiatan *supervisee* melainkan juga bertanggung jawab untuk membantu *supervisee* mengeksplorasi isu-isu dan dampaknya pada kehidupan profesinya, bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan etis, menghadapi konflik (Billot & Peluso, 2009). Beberapa permasalahan penelitian yang pernah diungkapkan mengenai supervisi yaitu hubungan antara yang diawasi (*supervisee*) dengan pengawas (*supervisor*), gaya supervisi. Amstrong (2004) mengungkapkan tingkat kegagalan yang tinggi dalam penelitian ilmu sosial sebagian besar dikaitkan dengan ketidakpuasan terhadap supervisi dan buruknya hubungan dengan pengawas.

Penelitian lain mengungkapkan budaya organisasi akan mempengaruhi bagaimana praktik supervisi dilaksanakan. Tidak adanya konsistensi dalam supervisi dan pentingnya evaluasi merupakan keadaan supervisi yang terjadi saat ini (Henderson, dkk.,2015). Selanjutnya, Falender dalam penelitiannya mengeksplorasi mengenai kesan *supervisee* terhadap kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas yakni kurangnya supervisi kerja merupakan pelanggaran etis yang paling sering dilakukan oleh pengawas (Falender, C.A., 2014). Efektivitas supervisi akhir ini menjadi sorotan yang dinilai berdasarkan gaya, dan evaluasi supervisi dsb (Ladany, Mori, Mehr, 2013). Pentingnya memiliki pedoman dan standar supervisi bertujuan meningkatkan apresiasi supervisi sebagai kegiatan profesional (Falender, C.A., 2014).

Mengacu pada tujuan supervisi yakni peningkatan kualitas kinerja dan kualitas profesional dalam bentuk layanan BK masih belum ada temuan penelitian yang menggambarkan peningkatan pada guru BK sebagai hasil dari ketercapaian tujuan supervisi baik dalam profesional maupun pribadi. Kualitas kinerja profesional merupakan kemampuan guru BK dalam tanggung jawab kerjanya yang terkait dengan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif. Layanan komprehensif dijabarkan sebagai berikut: (1) Layanan dasar meliputi bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok; (2) Layanan responsif meliputi konseling individual, konseling kelompok, referral, konsultasi,

konferensi kasus, kunjungan rumah; (3) layanan peminatan dan perencanaan individual; (4) dukungan sistem meliputi kegiatan manajemen, kolaborasi, pengembangan diri.

Temuan observasi yang dijelaskan oleh Matondang, A.M., Prayitno, & Jaya, Y. Tahun 2016 di SLTA Negeri Kota Pariaman menggambarkan bagaimana kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang terjadi sebagai berikut: (a) guru BK belum memahami tugas pokoknya; (b) guru BK masih bingung untuk pemberian layanan setiap minggunya; (c) pemberian layanan bimbingan dan konseling tanpa ada program kerja dan tidak berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik, (d) pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling belum ideal 2 jam hanya 1 jam pelajaran, (e) pengadministrasian sebagai bukti fisik belum maksimal, (f) penyusunan program bimbingan dan konseling belum benar-benar sesuai kebutuhan peserta didik, (g) penilaian layanan bimbingan dan konseling hanya dilakukan di tengah atau akhir semester tidak pada setiap layanan.

Temuan penelitian lain masih membahas secara umum praktik supervisi, yang salah satunya diungkapkan dalam Konferensi Cabang ABKIN DKI Jakarta melalui informasi online dari RadarOnline.id (2018) disampaikan bahwa guru BK juga dilakukan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, masalah yang muncul berkaitan dengan supervisi pada guru BK adalah seringkali kepala sekolah maupun pengawas tidak mengerti tentang BK sehingga diharapkan ada advokasi melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada kepala sekolah dan pengawas.

Adapun beberapa hasil penelitian mengenai pelaksanaan supervisi bimbingan dan konseling di Indonesia yaitu penelitian Ulfa, Sugiyo, dan Edy, P. Tahun 2014 yang dilakukan di SMP Negeri Kabupaten Sleman mengungkapkan bahwa kondisi supervisi BK SMP adalah sebagai berikut: (a) instrumen supervisi bimbingan dan konseling yang dimiliki belum menggali untuk kerja profesional guru BK; (b) supervisi hanya menitikberatkan pada aspek administrasi.

Selanjutnya, penelitian Basith, A. & Awalya tahun 2015 yang dilakukan di Kabupaten Kubu Raya mengungkapkan bahwa masih banyak kekurangan dalam supervisi yakni: (a) supervisi bersifat sewaktu (1 tahun sekali) dan bersifat administratif; (b) pengawas hanya mengecek pekerjaan tanpa memberi perbaikan;

(c) pengawas tidak melakukan identifikasi kebutuhan guru BK, tidak menyusun program supervisi, tidak menyiapkan pendekatan tertentu, hanya memberi masukan tanpa pembinaan, tidak melakukan kontrol perkembangan guru BK dan tidak melakukan *follow up*.

Penelitian lain mengenai supervisi yang dilakukan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Matondang, A.M., Prayitno, & Jaya, Y. Tahun 2016 di SLTA Negeri Kota Pariaman mengungkapkan bahwa kinerja pengawas belum menggambarkan seharusnya atau masih dalam kategori sedikit terlaksana, belum sesuai standar atau belum optimal dengan penjabaran: (a) kualitas pemantauan berada dalam kategori cukup di SMA dan cukup di SMK, (b) kualitas penilaian berada dalam kategori cukup di SMA dan cukup di SMK, (c) kualitas pembinaan berada dalam kategori cukup di SMA dan baik di SMK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas BK SMA di Kabupaten majalengka ditemukan bahwa sebaran pengawas BK di Provinsi Jawa Barat masih belum merata baik di satuan pendidikan SMA apalagi di SMK. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang belum memiliki pengawas BK. Adapun sebaran data pengawas BK di tingkat satuan pendidikan menengah di Jawa Barat dengan latar belakang pendidikan BK adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Tasik, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat hanya pengawas SMA;
- 2) Kabupaten Cirebon hanya ada pengawas SMK,
- 3) Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung sudah ada pengawas SMA dan SMK;
- 4) Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Depok, Kabupaten Cimahi belum ada pengawas BK,
- 5) Kabupaten Subang serta Kabupaten Karawang pengawas BK menjelang pensiun tahun ini; dan
- 6) Kabupaten Banjar dan Kabupaten Pangandaran hanya memiliki 1(satu) pengawas untuk pengawas manajerial dan akademik seluruh mata pelajaran,

mengingat jumlah sekolah yang sedikit dan dianggap mencukupi karena minimal 1(satu) pengawas membina 7 sekolah dan 40 guru untuk pengawasan akademik.

Berdasarkan beberapa temuan penelitian yang ada serta pentingnya kualitas supervisi dalam proses supervisi untuk peningkatan kualitas profesional maka penelitian ini mencoba mengeksplorasi isu-isu praktik supervisi khususnya dalam konteks praktik supervisi bimbingan dan konseling yang meliputi fungsi dan tujuan supervisi, kegiatan supervisi, hubungan pengawas dengan guru BK, evaluasi supervisi, serta bagaimana sistem supervisi berpengaruh pada kinerja guru BK baik secara pribadi maupun profesional. Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memperoleh gambaran informasi secara mendalam mengenai praktik supervisi bimbingan dan konseling di satuan pendidikan SMA.

B. Fokus Kajian

Supervisi merupakan bagian penting dalam keseluruhan program bimbingan dan konseling. Penting dilaksanakan sebagai upaya pengembangan dan peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling sebagai kegiatan profesional. Idealnya kegiatan supervisi bimbingan dan konseling bukan hanya sebagai suatu kegiatan yang bersifat penilaian atasan ke bawahan dan administratif saja. Akan tetapi, kegiatan supervisi sebagai suatu kegiatan yang dapat memberikan *feedback* bagi guru BK. Pemahaman tentang supervisi ini tidak hanya bagi para pengawas BK maupun kepala sekolah, tetapi juga bagi guru BK agar terjadi hubungan yang baik diantara *supervisor dan supervisee*.

Mempertimbangkan tujuan utama supervisi adalah untuk pengembangan profesional / layanan, maka penting untuk memahami kualitas dari praktik dan proses supervisi dilakukan. Secara legal pengawas bimbingan dan konseling terdapat dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, namun dalam praktiknya masih belum terlaksana dengan optimal sesuai standar kompetensi dan kualifikasi pengawas sekolah. Sedangkan, fakta di lapangan mengenai kegiatan supervisi yang lebih banyak terlaksana dalam fungsi administratif menjadi kajian penelitian ini mengingat tugas pokok dan peran pengawas tidak hanya melakukan supervisi administratif jika mengikuti standar

pengawasan dalam panduan kerja pengawas yang sudah disusun oleh Kemendikbud tahun 2017.

Tujuan lain dari kegiatan supervisi adalah peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling yang lebih efektif, maka pemahaman tentang sifat supervisi perlu dikaji untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan supervisi dilaksanakan. Namun, penelitian tentang supervisi masih minim dilakukan terutama terkait dengan kualitas pelaksanaan supervisi dalam hal ini adalah supervisi dalam bimbingan dan konseling.

Loganbill, C., Hardy, E., Delworth, U. (1982, hlm.17-26) isu-isu terkait supervisi dalam variabel konselor adalah sebagai berikut: (1) isu kompetensi, (2) isu kesadaran emosional, (3) isu kemandirian, (4) isu identitas teoritis; (5) isu menghargai perbedaan individu; (6) isu arah dan tujuan layanan; (7) isu motivasi pribadi, (8) isu etika profesional.

Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada analisis mendalam pelaksanaan supervisi bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh pengawas terhadap guru BK. Melalui alur berpikir yang dirancang dalam penelitian ini yakni berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai kualitas atau mutu pelaksanaan layanan BK di sekolah dipandang perlu ada peningkatan kualitas layanan dimana kualitas layanan BK akan bergantung pada kualitas dari guru BK sebagai orang yang memberikan layanan. Untuk meningkatkan kualitas kinerja guru BK perlu ada upaya yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan melalui kegiatan supervisi oleh pengawas.

Keterkaitan antara supervisi dengan guru BK didukung melalui penelitian terdahulu yakni penelitian Taufiq, A. (2017) mengungkapkan bahwa model pengawasan komprehensif efektif untuk mengembangkan kompetensi profesional calon konselor sekolah dalam program pendidikan profesional di SM-3T. Selanjutnya, Turhastuti (2007) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara supervisi bimbingan dan konseling dan sikap profesional terhadap kinerja guru pembimbing dengan $pvalue = 0,001$ ($p < 0.05$). Ardika (2010) mengungkapkan supervisi BK berkontribusi signifikan terhadap kinerja guru pembimbing sebesar 46,30% di Kabupaten Bandung. Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, lebih mengungkapkan satu fokus

penelitian dalam supervisi bimbingan dan konseling misalnya hanya instrumentasi supervisi, model supervisi, hubungan supervisi, atau penelitian korelasional antara supervisi dengan peningkatan kinerja profesional.

Lebih lanjut lagi penelitian ini akan dilakukan untuk memahami secara mendalam mengenai praktik pelaksanaan supervisi bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh pengawas bimbingan dan konseling terhadap guru BK berkaitan dengan pemahaman pengawas dan guru BK mengenai supervisi BK, proses supervisi yang dilaksanakan menyangkut pemahaman dasar supervisi sampai pada evaluasi kegiatan supervisi, serta respon guru BK yang diawasi terhadap kegiatan supervisi yang dilaksanakan sebagai analisis pengaruh yang dirasakan guru BK terhadap kegiatan supervisi yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus kajian yang dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana praktik pelaksanaan supervisi bimbingan dan konseling di SMA Kabupaten Majalengka dilaksanakan oleh pengawas terhadap guru BK. Adapun pertanyaan penelitian secara spesifik disusun sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pemahaman dan pelaksanaan fungsi supervisi BK di SMA Kabupaten Majalengka?
- 2) Bagaimana pemahaman pengawas dan guru BK terhadap tujuan supervisi BK yang dilaksanakan di SMA Kabupaten Majalengka?
- 3) Siapa dan apa yang menjadi sasaran supervisi BK di SMA Kabupaten Majalengka?
- 4) Bagaimana pelaksanaan kegiatan supervisi BK di SMA Kabupaten Majalengka?
- 5) Bagaimana hubungan antara pengawas dengan guru BK dalam supervisi BK di SMA Kabupaten Majalengka?
- 6) Bagaimana pelaksanaan evaluasi supervisi BK di SMA Kabupaten Majalengka?
- 7) Bagaimana dampak supervisi bimbingan dan konseling terhadap kinerja guru BK?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi suatu kasus atau fenomena mengenai praktik supervisi konselor atau guru bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh pengawas BK di tingkat satuan pendidikan SMA serta dampaknya pada kinerja guru BK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian ini akan menambah kajian keilmuan bimbingan dan konseling terutama dalam bidang supervisi BK secara mendasar fungsi dan tujuan, kegiatan supervisi, hubungan dalam supervisi, evaluasi supervisi dan dampak supervisi terhadap kinerja guru BK.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktik dalam pendidikan serta bimbingan dan konseling, bagi pengawas BK, serta profesi BK. Secara umum penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan kegiatan supervisi BK. Lebih rinci lagi hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi beberapa pihak yang diharapkan dapat mengembangkan keilmuan bimbingan dan konseling khususnya mengenai supervisi BK sebagai berikut.

- 1) Bagi peneliti, dapat memberikan pemahaman mengenai kegiatan supervisi bagi peningkatan kinerja dan profesionalitas guru BK, memperoleh pengalaman mengenai proses supervisi, serta menambah kemampuan dalam melaksanakan proses penelitian.
- 2) Bagi pengawas BK, hasil penelitian dapat dijadikan gambaran maupun evaluasi proses supervisi yang selama ini dilakukan pada guru BK melalui respon dan tanggapan guru BK mengenai proses supervisi yang dilakukan.
- 3) Bagi profesi bimbingan dan konseling, penelitian ini dapat dijadikan kajian keilmuan bimbingan dan konseling terutama mengenai supervisi BK yang benar-benar terjadi di lapangan sehingga dapat menjadi evaluasi dan perhatian dalam supervisi BK sebagai kegiatan penting dalam peningkatan mutu layanan BK dan profesionalitas guru BK.

E. Struktur Organisasi Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan alasan dilaksanakan penelitian, pentingnya penelitian supervisi bimbingan dan konseling dalam pendidikan serta keilmuan bimbingan dan konseling, menjelaskan pertanyaan penelitian yang akan menjadi kajian penelitian serta tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian baik secara teoretis maupun praktis.

BAB II KONSEP DASAR SUPERVISI BIMBINGAN DAN KONSELING

Bab II merupakan literatur revidu yang menjadi dasar atau landasan teori dalam pelaksanaan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan mengacu pada teori yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan prosedur peneliti dalam merancang alur penelitian mulai dari pendekatan, instrumen, pengumpulan data, sampai pada analisis data yang diperoleh dari penelitian.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV memaparkan hasil temuan di lapangan selama penelitian, menjelaskan hasil display data temuan dan analisis data temuan serta membahas hasil penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sudah dirancang berdasarkan kajian teori yang relevan.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi simpulan terhadap keseluruhan hasil temuan penelitian, mengemukakan hal-hal penting untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait yang memiliki implikasi dalam penelitian.